

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, hubungan China dan Australia mengalami titik terendah. Hal ini berawal ketika pada bulan April 2020 Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyerukan perlunya penyelidikan global terhadap asal-muasal dan penanganan China atas adanya wabah COVID-19 di Wuhan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelidikan kepada China yang dinilai mungkin bertanggung jawab atas adanya pandemi global. Seruan dimaksud mendapat reaksi penolakan kuat dari China dan perkembangan selanjutnya mengantar hubungan kedua negara ke dalam situasi konfliktual yang berimbas ke aspek-aspek di bidang perdagangan maupun hubungan ekonomi lainnya (Okano, 2021).

Sejak Mei 2020, China mulai menerapkan serangkaian sanksi perdagangan terhadap produk Australia. Hal tersebut meliputi adanya pembatasan impor daging sapi, barley, kapas, batubara termal, kayu, tembaga, dan lobster Australia. Sanksi tersebut juga diperluas hingga pengenaan tarif yang lebih tinggi pada produk Australia lainnya seperti anggur.

China lebih lanjut mengguncang ekonomi Australia dengan serangkaian peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar China di Australia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China. Pemerintah China memperingatkan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Australia karena peningkatan yang signifikan dalam serangan rasis terhadap orang China dan Asia (Zatira & Prakoso, 2020). Serangkaian tindakan ini dinilai merugikan industri pertanian, pertambangan, manufaktur, pariwisata, dan pendidikan tinggi Australia. Untuk menanggapi hal

tersebut, Pemerintah Australia memutuskan untuk terus mengenakan bea cukai anti-dumping pada impor China.

Selain itu, aturan yang lebih ketat terkait investasi asing juga diperkenalkan sebagai penargetan investasi China di Australia dengan menempatkan kolaborasi negara bagian atau universitas dengan China di bawah tekanan (Okano, 2021). Serangan timbal balik antara kedua negara semakin meningkat ketika Australia mengajukan perselisihan melawan China di Organisasi Perdagangan Dunia. Seiring dengan ketegangan perdagangan sengketa diplomatik kedua negara juga semakin intens. Perdana Menteri Morrison berjanji untuk memberikan tempat berlindung yang aman bagi penduduk China dengan memperkenalkan undang-undang keamanan nasional.

Menanggapi hal tersebut, kedutaan besar China di Australia memperingatkan pemerintah Australia karena dianggap terlalu ikut campur dalam politik dalam negeri China. Australia juga telah mencabut visa pelajar China dan menargetkan pejabat media China di Australia atas dasar menghilangkan campur tangan politik China di Australia. Sebagai balasannya, pejabat keamanan nasional China menyelidiki dua jurnalis Australia dan memaksa mereka untuk meninggalkan China. Australia kemudian meminta permintaan maaf dari China tetapi tidak mendapat tanggapan. Serangkaian masalah diplomatik ini berlatar belakang kekhawatiran keamanan Australia yang lebih luas yang mencirikan pertumbuhan China sebagai ancaman bagi kawasan Asia-Pasifik. Sebagai tanggapan, Australia telah mengkonsolidasikan kolaborasi dengan sekutu dan mitra regionalnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Jepang, dan India.

Isu ini dianggap penting karena meskipun kemitraan ekonomi yang dinormalisasi akan mencapai keuntungan bersama bagi Australia dan China, isu ini juga dinilai sebagai bentuk ancaman jangka panjang bukan sekadar manuver politik. Kedua negara beberapa kali telah menuntut permintaan maaf satu sama lain untuk

menyelesaikan ketegangan (Okano, 2021). Akan tetapi, hal ini tidak akan menjadi tugas yang mudah dikarenakan terdapat banyak hal yang dipertaruhkan. Di balik konflik antara keduanya, baik Australia dan China telah berusaha untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka untuk membatasi ketergantungan satu sama lain.

Australia-China telah mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap keputusan keduanya dalam mengambil risiko meningkatnya ketegangan lebih lanjut sebagai bentuk menunjukkan kekuatan. Keuntungan ekonomi bersama yang diserahkan kepada kepentingan politik dan ideologis nasional dalam wacana ini menunjukkan bahwa mungkin terdapat bahaya yang akan datang. Penting bagi Australia untuk mengingat bahwa meskipun China tetap menjadi mitra dagang terbesar Australia, Australia hanya terdaftar sebagai mitra dagang keenam bagi China setelah Uni Eropa, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang (Okano, 2021). Hubungan perdagangan asimetris ini dapat merugikan Australia jika ketegangan meningkat. Pada akhirnya, Australia dan China sama-sama perlu mempertimbangkan bagaimana perselisihan yang lebih kecil ini membentuk kawasan ini di masa depan.

Masalah ini dianggap penting karena sikap China yang setelah mengeluarkan sejumlah kebijakan retaliasi di bidang perdagangan, Pemerintah China mengambil Kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia. Kebijakan ini bisa dilihat sebagai 'anomali' karena menyusul berbagai kebijakan di bidang perdagangan. Selain itu, dalam permasalahan ini juga dapat dilihat bahwasanya respon yang diambil oleh China terhadap tindakan yang dilakukan oleh Australia terkait ketegangan yang dialami oleh kedua negara. Isu ini juga berpengaruh terhadap bagaimana negara lain belajar bahwasanya tindakan atau respon yang diambil oleh negara harus mempertimbangkan banyak aspek dan juga dampaknya dalam jangka panjang agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru

yang merugikan negara itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui Mengapa Pemerintah China mengambil Kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia dalam Konflik China-Australia tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Mengikuti uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini; Mengapa Pemerintah China mengambil Kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia tahun 2020?

1.3 Tinjauan Pustaka

Australia dan China telah mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif satu sama lain, dan sementara masalah yang dihadapi mungkin tidak tampak sentral sehingga dapat menjadi tanda bahaya yang lebih besar dimasa depan. Bahkan pada tahun 2018, tampaknya hubungan bilateral Australia-China mendekati bentuk terburuknya dalam satu dekade, dan pada tahun 2019 hubungan antara kedua negara semakin memburuk. Australia-China telah mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap pengumuman publik mereka yang menunjukkan bahwa mereka bersedia mengambil risiko meningkatnya ketegangan lebih lanjut sebagai imbalan untuk menunjukkan kekuatan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menganalisis Mengapa Pemerintah China mengambil Kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia tahun 2020. Jadi, berdasarkan literatur yang ada terdapat dua faktor yang mempengaruhi China dalam mengambil Kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswanya ke Australia dalam Konflik Australia-China 2020 yakni Rasisme dan Peran Mahasiswa dalam bidang Ekonomi.

Untuk memahami mengapa China menetapkan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswanya ke Australia, maka penulis akan menguraikan beberapa rujukan akademis yang membahas topik tersebut. Pada tinjauan pustaka ini,

peneliti akan meninjau beberapa literatur terkait dengan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia berdasarkan faktor konflik Australia-China 2020. Okano, Y. (2021) dalam tulisanya yang berjudul *Deepening Conflict between Australia and China: A Transition Period to a New Equilibrium Point*. Okano, Y. (2021) menjelaskan bahwa hubungan antara Australia dan China berada pada level terburuk yang pernah ada. Ketika China memberlakukan sanksi ekonomi, Australia menyerukan dialog. China yang tidak puas dengan Australia selama beberapa tahun terakhir, belum menanggapi permintaan itu. Tidak ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda kebobolan, dan situasinya tetap buntu. Bagi Australia, mengurangi ketergantungan ekonominya pada China semakin penting. Investasi perdagangan dan diversifikasi rantai pasokan sangat penting. Australia kemungkinan akan memperkuat hubungannya dengan India, negara dengan permintaan sumber daya yang terus meningkat, dan Asia Tenggara, yang melihat pertumbuhan kelas menengah. Mempertimbangkan kalender politik, kemungkinan besar situasi tidak akan membaik sampai setelah pemilihan Australia, yang menurut sebagian orang akan diadakan sebelum akhir tahun. Kemungkinan pelanggaran sanksi China hanya akan berlangsung secara bertahap. Ketika konflik antara Amerika Serikat dan China menjadi radikal, hubungan Australia-China tidak akan kembali normal, meskipun membaik sampai batas tertentu tetap cenderung memburuk karena alasan kecil apa pun. Kemudian White (2017) dalam tulisanya yang berjudul *Without America: Australia in the New Asia* juga menyebutkan bahwasanya Konflik material seperti perang dagang, friksi teritorial, dan perebutan pengaruh internasional sebagian besar tidak ada atau setidaknya belum menjadi ciri menonjol dalam hubungan Australia-China. Dalam konteks ini, dari sudut pandang realis Australia sebagai sekutu utama AS telah membuat kebiasaan melihat dunia melalui mata yang terakhir dan mendukung kepentingan strategisnya. Hal ini yang kemudian membuat Australia dalam konfliknya dengan China pada tahun 2020 tetap memegang teguh kepentingan nasionalnya dibandingkan dengan mengikuti syarat China untuk menghormati

kepentingannya. Hal ini kemudian didukung oleh tulisan Dalzell (2020) yang berjudul *Scott Morrison says Australia won't respond to Chinese 'coercion' overwarning about universities* yang mengatakan bahwa permainan saling menyalahkan dan keegosian antara China dan Australia menunjukkan adanya kekacauan yang belum pernah dialami kedua negara sebelumnya. Hal ini menandakan runtuhnya diplomasi yang sebelumnya rutin dilakukan. Akibatnya, konflik yang meningkat seperti itu melambangkan perbedaan besar dalam narasi Australia yang membuat Australia tidak mungkin menjadi tegas dan mendapatkan pengakuan identitasnya dari mitra dagang terpentingnya.

Adapun kategori kedua yakni terkait dengan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia berdasarkan faktor rasisme. Ly Tran, Huyen Bui, & Varsha Devi Balakrishnan (2020) dalam tulisanya *Forms of Racism and Discrimination faced by International Students* menyebutkan bahawasanya di Australia, baik Australian Asian Alliance maupun Australian Human Rights Commission menerima peningkatan jumlah laporan serangan fisik dan verbal terkait COVID-19 yang terjadi di jalanan, toko dan supermarket, transportasi umum, dan tempat lainnya. Graffiti dan vandalisme dengan pesan rasis juga ditemukan merusak rumah orang Asia-Australia. Di antara serangan rasis yang dilaporkan di Australia adalah dua mahasiswa Asia yang dipukuli di Melbourne CBD, seorang dokter Asia di Geelong yang dilecehkan ketika menunggu untuk dibawa pulang dan rumah-rumah keluarga Asia di Sydney dan Melbourne dirusak dengan pesan-pesan pelecehan. Salah satu bentuk khas rasisme terkait pandemi adalah julukan rasis 'virus', 'coronavirus' yang biasa disapa pelajar Asia. Misalnya, siswa internasional Tiongkok mengalami tingkat kecemasan, diskriminasi, dan rasa tidak aman yang sangat tinggi selama pandemi. Mereka telah mengalami serangan xenofobia secara verbal dan fisik dan sering dikaitkan dengan virus corona seperti "Anda membawa virus" dan "Virus Corona, Cina". Sekelompok mahasiswi Tionghoa dalam penelitian ini mengatakan

bahwa mereka dikejar oleh remaja lokal di jalan, yang meneriakkan “virus, virus China” kepada mereka. Kemudian, Zatira, Z. Z & Prakoso, M. P (2020) dalam tulisanya *The Corona Case and the Increasing Cases of Racism and Xenophobia against Chinese Ethnic Groups in the World* menjelaskan mengenai Apakah terjadi peningkatan yang signifikan terkait kasus rasisme dan xenofobia di seluruh dunia selama Virus Corona. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan teori sanksi dalam hubungan internasional dan rasisme. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan kasus rasisme dan xenofobia di seluruh dunia selama Virus Corona. Pandemi virus corona 2019-2020 telah berhasil meningkatkan prasangka, xenophobia, konversi, perlawanan, dan rasisme terhadap orang-orang dengan penampilan Tionghoa dimata orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara, dan di seluruh dunia. Adanya virus ini mengajak dunia menjadi sentimentil terhadap masyarakat Asia, khususnya China. Warga negara China mengalami berbagai macam diskriminasi dari berbagai kelompok, seperti beberapa contoh di atas. Beberapa negara secara terbuka membuat daftar hitam warga negara China untuk tidak mengunjungi negara mereka. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Namun, peneliti merasa cara ini dinilai terlalu berlebihan jika harus mendiskriminasi salah satu pihak.

Rasisme sebagai salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia juga didukung oleh Dovchin, S. tahun 2020 dalam tulisanya *The psychological damages of linguistic racism and international students in Australia*. Dovchin (2020) menjelaskan bahwasanya berdasarkan analisis wawancara etnografis mahasiswa internasional di Australia, penelitian ini berupaya memperluas diskusi kritis dalam studi bilingual dan pendidikan bilingual dengan memahami gagasan 'rasisme linguistik' dalam kaitannya dengan kerusakan psikologis. Perspektif terpadu mengatasi rasisme dan kelainan

psikologis bersama-sama mungkin akan berguna dalam mengembangkan intervensi terhadap orang-orang latar belakang imigran yang menderita depresi karena diskriminasi dan rasisme yang dirasakan. Konsep 'rasisme linguistik' dengan demikian diperluas melalui dua diskusi utama yakni penindasan aksen etnis dan stereotip linguistik. Pertama, konsep intimidasi aksen etnis yang mengacu pada intimidasi terhadap aksen bahasa Inggris biografis penutur latar belakang etnis dan bahasa yang berbeda. Temuan menunjukkan bahwa bullying aksen etnis sebagian besar terjadi dalam bentuk tertawa dan bercanda di kelas, lingkungan sekolah, dan tempat umum. Aksan etnis sering dikenakan pada linguistik yang memperlakukan, seperti penutur etnis yang tidak dapat dipahami atau sebagai penipu konyol yang diperparah oleh intoleransi orang terhadap penutur asli bahasa Inggris. Kedua, konsep stereotip linguistic yang mengacu pada persepsi dan penilaian negatif yang tetap pada penutur bahasa Inggris berdasarkan ras, etnis, dan kebangsaan mereka. Data menunjukkan bahwa siswa internasional dengan latar belakang etnis dan ras yang berbeda sering terdengar atau terlihat berbicara bahasa Inggris dengan buruk atau kecakapan rendah terlepas dari kemahiran bahasa Inggris tingkat tinggi atau bahkan tingkat asli mereka yang sebenarnya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Asian Australian Alliance tahun 2020 dalam tulisanya *Reporting Racism Against Asians in Australia Arising due to the COVID-19 Coronavirus Pandemic*. Asian Australian Alliance (2020) dalam tulisanya menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan diperoleh data yang mengatakan bahwa Siswa internasional menyumbang 15% responden, 80% di antaranya berasal dari latar belakang Cina. Saat ini ada lebih dari 165.000 siswa Tiongkok yang belajar di Australia, yang merupakan seperempat dari semua siswa internasional. Pendidikan adalah penghasil ekspor terbesar ketiga di Australia, menyumbang \$30,3 miliar dolar pada tahun 2017. Kementerian Pendidikan Tiongkok baru-baru ini memperingatkan siswa Tiongkok yang mempertimbangkan/sedang belajar di Australia untuk waspada terhadap 'insiden rasis' yang timbul dari pandemi. Dengan 80% responden survei

siswa internasional yang berasal dari Tiongkok, data tersebut memperkuat klaim yang dibuat oleh Kementerian dan berpotensi menyebabkan penurunan jumlah siswa Tiongkok di Australia di masa depan. Sebanyak 40% responden paling sering mengalami insiden rasis di jalan umum atau trotoar dan 22% di supermarket dengan mayoritas tindakan rasisme berupa ancaman fisik atau verbal. Data tersebut sejalan dengan liputan media yang seringkali membagikan bukti dalam bentuk rekaman video amatir mengenai meningkatnya jumlah serangan rasial terhadap orang Asia di ruang publik. Serangan rasis tersebut semakin dipicu oleh liputan media yang negatif mengenai orang Asia di Australia, seperti hoaks rasis tentang orang Asia yang menimbun barang selama pandemi covid19.

Dan kategori terakhir yakni terkait dengan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia berdasarkan peran mahasiswa internasional dalam bidang ekonomi. Haugen H.O & Lehmann, A. tahun 2020 yang berjudul *Adverse articulation: Third countries in China–Australia student migration during COVID-19*. Haugen H.O & Lehmann, A. (2020) menjelaskan mengenai migrasi pelajar China–Australia selama COVID-19 dan peran negara ketiga. Mobilitas adalah darah kehidupan modernitas dan virus yang mengancam untuk mempercepat kejatuhannya. Virus adalah metafora untuk gangguan apa pun yang menghambat mobilitas kehidupan sehari-hari, tetapi saat ini merupakan ancaman literal. Industri pendidikan Australia menghadapi tantangan untuk mencegah impor virus corona baru sambil menjaga AUS tahunan. Pendapatan Australia sebesar \$ 12 miliar yang dihasilkan dari siswa Cina. Pendapatan ini sebagian berasal dari pembelanjaan siswa selama berada di Australia dan sebagian besar bergantung pada kehadiran fisik mereka di negara tersebut. Institusi khawatir bahwa beralih ke pendidikan digital untuk siswa di China akan menurunkan tingkat retensi dan kesiediaan untuk membayar biaya penuh. Oleh karena itu, industri pendidikan lebih suka membawa siswa ke darat dan melobi untuk pembebasan dari pembatasan masuk.

Upaya pencabutan pembatasan perjalanan hanya berhasil dilakukan oleh kelompok pelajar SMA lanjutan Tiongkok yang relatif kecil. Ekonomi pendidikan besar Australia didasarkan pada mobilitas. Oleh karena itu, sektor pendidikan memantau dengan cermat penyebaran penyakit virus corona baru (COVID-19) di Tiongkok pada Januari 2020 karena khawatir hal itu akan menyebabkan penghentian tiba-tiba arus masuk pelajar Tiongkok. Kemudian juga Yu Tao tahun 2021 yang berjudul *Chinese Students Abroad in the Time of Pandemic: An Australian View*. Yu Tao (2021) menjelaskan mengenai pelajar China di Luar Negeri di masa pandemi berdasarkan sudut pandang Australia. Banyak negara menutup perbatasan mereka sebagai tanggapan atas pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Bagi sekitar 1,5 juta siswa dari Tiongkok yang terdaftar di lembaga pendidikan luar negeri, penutupan perbatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyebabkan banyak krisis. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan kembali dan merundingkan kembali rencana mereka untuk hidup dan belajar, harapan mereka terhadap tuan rumah dan negara asal mereka, serta identitas, loyalitas, dan rasa nasionalisme mereka. Australia menyediakan studi kasus yang ideal untuk mengkaji perilaku dan pengambilan keputusan mahasiswa China di luar negeri selama periode krisis global. Pendidikan internasional adalah pendapatan keempat terbesar Australia dalam bidang ekspor pada tahun anggaran 2019–2020. Selain itu, dalam Asia Taskforce (2020) yang berjudul *Australian Universities, international students and China* juga disebutkan bahwasanya Pada tahun 2019, pendapatan ekspor dari kegiatan pendidikan internasional di Australia lebih dari \$37,6 miliar termasuk didalamnya \$31 miliar dari pendidikan tinggi. Pendidikan adalah ekspor berbasis layanan terbesar di Australia dan penghasil ekspor terbesar ketiga secara keseluruhan.

Akan tetapi, ternyata dampak melemahnya hubungan Australia-China akibat COVID-19 tidak hanya sampai disitu saja. Pandemi ini juga berdampak terhadap keluarnya kebijakan yang dilakukan oleh China dengan menutup akses mahasiswanya

ke Australia. Adanya kebijakan ini membuat Australia mengalami overlap terkait mahasiswa asing sekaligus permasalahan terkait pendapatan negara yang menurun. Maka melihat beberapa literatur dan fenomena kontradiksi terkait dampak ketegangan Australia-China 2020 akibat COVID-19 terkait rasisme dan kondisi mahasiswa internasional China di luar negeri khususnya Australia, penelitian ini akhirnya mencoba untuk mengambil sudut pandang lain dalam melihat fenomena terkait adanya kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia oleh China karena penulis sebelumnya kurang menjelaskan dampak dari adanya kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia. Penulis mencoba lebih memfokuskan pada mengapa China menetapkan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswanya ke Australia serta apa dampak dari adanya kebijakan tersebut terhadap Australia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Sanksi dalam Hubungan Internasional

Literatur akademik tidak menggunakan istilah sanksi secara konsisten atau seragam. Sanksi internasional menanggukuhkan interaksi normal antara negara-negara di wilayah tertentu. Tujuannya adalah, dalam konteks interaksi ini, untuk mengubah perilaku tertentu di sisi negara target. namun, sanksi kadang-kadang juga diarahkan pada aktor non-negara(Rudolf, 2007). Sanksi ekonomi terutama didefinisikan dalam literatur sebagai gangguan dalam transaksi ekonomi normal atau pembatasan akses ke sumber daya ekonomi. Tiga jenis sanksi ekonomi dapat diidentifikasi sebagai berikut yakni sanksi ekspor, sanksi impor dan sanksi keuangan(Rudolf, 2007). Dua varian pertama adalah pemutusan hubungan dagang, sedangkan sanksi keuangan dimaksudkan untuk menghambat akses permodalan. Evaluasi yang berusaha untuk menetapkan efektivitas sanksi ekonomi terutama berkonsentrasi pada mereka yang bertujuan untuk membawa perubahan politik di negara target, baik dalam kebijakannya maupun pemerintahannya. Ada sedikit minat dalam literatur sanksi

tentang langkah-langkah yang bertujuan merusak kemampuan militer suatu potensi atau lawan yang sebenarnya(Rudolf, 2007).

Prasyarat umum sanksi untuk memberikan dampak ekonominya mudah untuk didenominasikan antara lain adalah: ketergantungan yang kuat pada perdagangan luar negeri; ekonomi domestik kecil; partisipasi mitra dagang terpenting dalam sanksi; peluang yang sangat terbatas untuk beralih ke pasar ekspor dan negara impor lain; sedikit cadangan mata uang(Rudolf, 2007). Namun, sanksi yang efektif secara ekonomi tidak harus efektif secara politik. Secara tradisional, temuan ini cenderung dikecualikan dari analisis sanksi ekonomi, tetapi saat sanksi yang efektif secara politik memainkan peran sentral dalam efektifitas sanksi yang diberikan kepada para ilmuwan politik.

Dalam sebagian besar kasus sanksi ekonomi yang melayani tujuan politik bersandar pada asumsi kausal tentang bagaimana dampak ekonomi dari sanksi mempengaruhi perilaku politik negara target. Dua model dasar dari hubungan kausal antara biaya ekonomi dan perilaku politik dapat dibedakan: di satu sisi, model makro klasik dari aktor negara rasional yang mengejar perhitungan biaya-manfaat dan, di sisi lain, model mikro. dari pluralitas kepentingan yang berfokus pada efek spesifik sanksi pada kelompok masyarakat dan aktor negara yang berbeda(Rudolf, 2007). Dalam kerangka model klasik, sanksi kemungkinan besar memiliki efek politik yang diinginkan ketika mereka menyebabkan kerusakan ekonomi sebanyak mungkin di negara target. Dalam keadaan ini, perhitungan biaya manfaat pemerintah akan berubah. Dalam skenario yang paling sederhana, misalnya dalam konflik perdagangan, ini berarti bahwa aktor politik terkemuka akan menimbang biaya sanksi terhadap manfaat kebijakan atau perilaku yang dikenai sanksi. Perhitungan biaya-manfaat bersifat lebih kompleks dalam kasus sanksi yang dijatuhkan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma yang diterima secara internasional(Rudolf, 2007). Sanksi dimaksudkan untuk meningkatkan biaya dukungan politik domestik dan legitimasi

yang menjadi sandaran semua rezim, meskipun pada tingkat yang berbeda, untuk mengamankan kekuasaan mereka dalam jangka panjang. Sanksi yang efektif secara ekonomi menghasilkan peningkatan biaya di beberapa aspek seperti: harga naik untuk konsumen, terjadi kekurangan pasokan; dunia usaha menderita akibat terganggunya transaksi ekonomi; pengangguran meningkat, dan sumber daya yang langka harus digunakan untuk mendukung peningkatan jumlah pengangguran.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwasanya sanksi yang diberikan oleh suatu negara merupakan alat yang digunakan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain. Dalam hal ini khususnya terkait sanksi ekonomi suatu negara. seperti halnya Australia-China yang memiliki hubungan perdagangan yang saling bergantung satu sama lain, adanya sanksi yang diberikan keduanya terhadap satu sama lain tentunya akan berpengaruh besar bagi negaranya. Akan tetapi dalam kasus Australia-China kali ini, China memiliki power lebih besar dalam hal ekonomi. Oleh sebab itu, sanksi yang diberikan China kepada Australia akan jauh lebih berdampak dan merugikan Australia dibandingkan dengan sanksi Australia terhadap China.

1.4.2 Pelajar Internasional dan Dampak ekonomi

Internasionalisasi telah menjadi elemen penting dari pendidikan tinggi di dunia. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan pendidikan tinggi akan mengglobal dari segi kelembagaan, dan akibatnya diharapkan internasionalisme menjadi tren yang kuat dalam intensitas yang meningkat (Altbach, 2006). Salah satu indikator terpenting internasionalisasi di perguruan tinggi adalah mobilitas mahasiswa. Mobilitas pelajar berkaitan dengan pelajar yang pergi ke luar negeri untuk tujuan pendidikan (Kelo, Teichler dan Wächter, 2006) dan dianggap sebagai dimensi penting globalisasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2014).

Institusi pendidikan tinggi merupakan faktor pencetus bagi ekonomi lokal dan nasional (Peterson, 2014). Individu yang melalui proses pendidikan tinggi

berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional pertama dengan biaya pendidikan tinggi yang memenuhi syarat yang mereka tanggung selama pendidikan mereka dan kedua dengan menjadi bagian dari tenaga kerja yang berkualitas di negara tuan rumah. Selain itu, permintaan akan ketergantungan yang lebih besar pada ekonomi berbasis pengetahuan ini telah meningkat pesat. Universitas penghasil pengetahuan adalah organisasi yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Oplatka dan Hemsley-Brown, 2010).

Banyak siswa dari negara berkembang bermigrasi ke negara maju, untuk belajar di sekolah dan universitas di negara maju. Mobilitas pelajar internasional merupakan media penting yang memungkinkan imigran berketerampilan tinggi datang ke negara-negara maju (Mok, 2010). Teori ekonomi menunjukkan bahwa imigrasi berketerampilan tinggi umumnya memiliki efek positif pada perekonomian negara tuan rumah (Bergerhoff, Borghans, Seegers dan van Veen, 2013).

Mobilitas mahasiswa internasional mempengaruhi banyak aspek dari kebijakan pendidikan tinggi, termasuk biaya kuliah, media pengajaran dan kualitas institusi pendidikan tinggi (DeVoretz, 2006). Selain itu, keuntungan ekonomi langsung dan tidak langsung yang diberikan oleh pendidikan internasional menarik minat negara-negara untuk menerima lebih banyak siswa internasional. Sebagai contoh di Australia, Pendidikan adalah penghasil ekspor terbesar ketiga di Australia, menyumbang \$30,3 miliar dolar pada tahun 2017. Saat ini ada lebih dari 165.000 siswa China yang belajar di Australia, yang mana merupakan seperempat dari semua siswa Internasional yang ada. hal tersebut tentunya membuat pendapatan atau ekonomi Australia yang berasal dari mahasiswa internasional terus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan pendidikan tinggi negara-negara tersebut yang muncul sebagai akibat dari fenomena ini telah berkontribusi pada mobilitas mahasiswa internasional (Cloete, Bailey, Bunting dan Maassen, 2011).

Menurut data statistik yang disediakan oleh direktorat pendidikan OECD, lebih dari 4,5 juta siswa di tingkat pendidikan tinggi telah belajar di luar negara mereka sendiri pada tahun 2012 (OECD, 2014). Diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 5,8 juta pada tahun 2020 dan 8 juta pada tahun 2025 (Altbach dan Bassett, 2004). Mobilitas mahasiswa internasional mempengaruhi semua aspek masyarakat global termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, industri, bisnis, politik dan budaya (Moor dan Henderkx, 2013). Siswa internasional memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian negara tempat mereka tinggal, baik dengan biaya kuliah yang dibayarkan maupun biaya yang dikeluarkan bersama anggota keluarga mereka untuk memenuhi akomodasi, biaya perjalanan dan kebutuhan sehari-hari (Vickers dan Bekhradnia, 2007).

1.5 Hipotesis

Dari kerangka teori diatas maka penulis memiliki hipotesis bahwa Pemerintah China memilih menghentikan pengiriman mahasiswa China ke Australia pada tahun 2020 menyusul adanya Pandemi COVID-19 diduga karena; Pertama, secara ekonomi kebijakan ini merupakan bentuk sanksi lanjutan yang diberikan China kepada Australia terkait dengan Konflik yang terjadi antara keduanya pada tahun 2020; Kedua, jika rasisme terhadap mahasiswa internasional China di Australia terus berlanjut dalam jangka panjang, penghentian sementara pengiriman mahasiswa ini akan semakin berdampak merugikan Australia melihat China yang memiliki power lebih besar dalam hal ekonomi dibandingkan Australia terhadap China dimana melihat peran mahasiswa internasional China yang sangat besar untuk perekonomian Australia.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 COVID-19

Perubahan iklim global adalah salah satu tantangan terpenting yang dihadapi komunitas internasional saat ini salah satu contoh yang sedang terjadi adalah COVID-19. Para ilmuwan telah menyajikan banyak sekali bukti bahwa perubahan iklim memang sedang terjadi, bahwa aktivitas manusia telah berkontribusi pada masalah tersebut, dan bahwa hal itu akan memiliki implikasi yang luas bagi ekosistem, termasuk pemukiman manusia (IPCC, 2007). Bahkan pemerintah dan perusahaan yang dulunya skeptis tentang penelitian iklim telah sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengurangi konsekuensi yang berpotensi bencana. Pemerintah nasional, organisasi internasional, kelompok nirlaba, dan perusahaan multinasional, sementara jarang menemukan konsensus, miliki selain itu kurang terlibat dalam dialog serius tentang masalah tersebut.

Karena perubahan iklim kemungkinan besar berdampak besar pada pertanian, pola permukiman, bencana alam, penyakit, dan aktivitas ekonomi secara lebih umum, banyak yang mulai berspekulasi tentang skenario masa depan dan potensi dampak manusia. Sekelompok sarjana, perencana kebijakan, dan aktivis telah menyarankan bahwa perubahan iklim akan memperburuk kelangkaan sumber daya, menciptakan perpindahan populasi massal, dan, pada akhirnya, memicu konflik kekerasan. Efek ini akan menjadi sangat akut di negara berkembang di mana infrastruktur kurang dan ekonomi pertanian paling sensitif terhadap tekanan lingkungan. Menulis di New York Times, Homer-Dixon (2007) berpendapat bahwa tekanan iklim mungkin merupakan tantangan bagi keamanan internasional yang sama berbahayanya dan lebih sulit daripada perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama perang

dingin. Perubahan iklim juga dinilai sebagai pengganda ancaman untuk ketidakstabilan suatu negara dan dunia secara global (CNA, 2007).

Pandemi COVID-19 menjelma menjadi krisis multidimensi yang mengancam stres dan mengikis khususnya kontrak sosial antara individu dan komunitas dengan negara yang mewakili, memerintah, dan melindungi mereka. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, dan meningkatkan risiko konflik kekerasan dan ketidakstabilan. Hal ini terutama terjadi dalam konteks berkembang dan terkena dampak konflik di mana dampak 'hilir' tidak langsung pada kematian dan kebutuhan kemanusiaan karena COVID-19 mungkin jauh melebihi dampak langsung dari virus itu sendiri. Di tingkat lokal dan sub-nasional, COVID-19 telah menekankan sistem tata kelola dan mata pencaharian yang lemah. Ini mengancam untuk memicu perpecahan sosial, ujaran kebencian, nasionalisme jingoistik, keluhan kelompok, migrasi, ketidaksetaraan, korupsi, dan kerentanan makroekonomi struktural. Lebih lanjut, momok peningkatan kekerasan perkotaan dan antarpribadi tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga mengancam untuk melemahkan upaya kesehatan masyarakat yang dimaksudkan untuk mengurangi virus. Hal ini juga menghambat tanggapan kemanusiaan dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan menekankan ketegangan geo-politik yang ada, terutama antara kekuatan besar, serta struktur multilateral.

1.6.1.2 Rasisme

Rasisme sering digunakan secara longgar dan tanpa banyak pertimbangan untuk menggambarkan kebencian dan perasaan negatif suatu kelompok etnis atau “komunitas” terhadap kelompok lain, serta berbagai tindakan yang dihasilkan dari sikap tersebut. Namun, antisipasi satu kelompok terhadap kelompok lain diekspresikan dengan keseriusan dan kebrutalan yang jauh melampaui prasangka dan kesombongan yang berpusat pada kelompok (Fredrickson, 2003).

Sedangkan rasisme, menurut Kwame Anthony Appiah, dipahami sebagai kepercayaan dengan sifat-sifat yang diwariskan yang dimiliki oleh anggota spesies

manusia, yang memungkinkan orang untuk membedakan mereka menjadi kelompok ras yang lebih kecil, sehingga semua anggota ras ini memiliki karakteristik khusus. Sifat dan kecenderungannya mirip, sehingga mereka tidak memilikinya bersama dengan anggota ras lainnya. Rasisme adalah ideologi yang membenarkan dominasi kelompok ras tertentu terhadap kelompok lain. Termasuk dalam pengertian ini adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu. Diskriminasi rasial memiliki tiga tingkatan, seperti individu, organisasi, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi rasial berupa sikap dan perilaku rasis. Di tingkat organisasi, diskriminasi rasial terlihat ketika kebijakan, aturan, dan undang-undang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Secara struktural, diskriminasi rasial dapat dilacak ketika satu lembaga sosial memberlakukan pembatasan dan pembatasan pada lembaga lain (Suharto, 2001).

Rasisme terkait erat dengan dominasi dan subordinasi satu kelompok sosial atas yang lain. Objek rasisme juga rentan terhadap stereotip, kebencian, dan kekerasan (baik fisik maupun non fisik) yang terjadi berulang kali. Bahkan jika negosiasi muncul, minoritas masih kalah. Rasisme sering didefinisikan sebagai prasangka, diskriminasi, atau kebencian yang ditujukan kepada seseorang karena warna kulit, etnis, atau asal negaranya. Rasisme dapat diekspresikan melalui stereotipe (kepercayaan rasis), prasangka (emosi/pengaruh rasis) atau diskriminasi (perilaku dan praktik rasis). Perilaku rasis dapat mencakup lelucon atau komentar yang menyakiti orang lain, pelecehan atau intimidasi, komentar di media atau online yang memicu permusuhan terhadap kelompok ras tertentu atau perlakuan tidak adil terhadap orang karena ras mereka. Namun rasisme lebih dari sekadar kata-kata, keyakinan, dan tindakan ini. Adapun rasisme linguistik yakni bentuk lain dari rasisme yang biasanya dialami oleh mahasiswa internasional karena keterikatan mereka dengan lingkungan akademik sebagai mahasiswa. Dovchin (2020) menunjukkan dua ciri utama rasisme linguistik: intimidasi aksen etnis dan stereotip linguistik. Rasisme

dan diskriminasi yang dihadapi siswa internasional mungkin berasal dari stereotip dan persepsi negatif tentang negara asal mereka sebagai diskriminasi nasional daripada rasisme tradisional yang semata-mata dari warna kulit mereka (Lee, 2006).

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang diawali dengan kata ‘mengapa’. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel dalam suatu fenomena. Dengan kata lain, penelitian eksplanatif akan menemukan akibat dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Oleh sebab itu tugas peneliti adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis. Dengan demikian penelitian ini tidak berupaya menciptakan teori baru atau memperdebatkan beberapa teori yang telah ada. Peneliti berfokus pada penggunaan teori dalam membahas permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan mengapa China menetapkan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswanya ke Australia serta apa dampak dari adanya kebijakan tersebut terhadap Australia .

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hubungan Australia-China terkait dengan ketegangan yang terjadi antara keduanya yang berdampak pada melemahnya hubungan kerjasama kedua negara. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak Januari 2020 ketika COVID-19 mulai masuk ke Australia dan Australia menyerukan penyelidikan terkait asal-usul COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China hingga desember tahun 2020 dimana China mulai melakukan tindakan kepada Australia dengan melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak kepada Australia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari laporan, artikel resmi dan pidato mulai dari pemerintah Australia-China yang dikumpulkan dalam sumber online baik situs web resmi maupun video pemberitaan. Sementara sumber sekunder didapat dari buku, jurnal ilmiah, laporan, dokumen resmi pemerintah, artikel yang kredibel dan sumber internet lainnya termasuk majalah online dan media berita.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini berfokus pada interpretasi data dan teori yang telah dipilih. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif guna mencari data-data yang relevan dan kredibel diperlukan reduksi data. Setelah itu dilanjutkan dengan penyajian data dan analisis teori hingga mencapai satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut yang kemudian akan digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian penulis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam IV Bab. Bab I berisi Pendahuluan termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka teoritik, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab II menjelaskan mengenai faktor pendorong pengambilan kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia. Bab III berisi tentang pembahasan dampak kebijakan Penghentian Sementara Pengiriman Mahasiswa China ke Australia dalam bidang ekonomi. Bab IV berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.